

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional di negara-negara pada umumnya terfokus pada pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari lapisan middle high yang ditandai dengan tingkat konsumsi yang tinggi yang memusat di perkotaan dan middle low dengan tingkat konsumsi yang lebih rendah dan biasanya memusat di pedesaan. Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan peningkatan kualitas dan standar hidup yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga erat kaitanya dengan kemampuan setiap daerah yang berbeda – beda dalam pembangunan , hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki, seperti sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta sumberdaya sosial (Maulidyah, 2014).

Pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat yang mayoritas masih hidup dibawah garis kemiskinan. Namun demikian tetap harus memperhatikan minoritas yang sama-sama mempunyai hak dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional juga harus memperhatikan kondisi daerah-daerah diseluruh Indonesia karena pembangunan daerah tidak bisa disamaratakan dengan alasan perbedaan

karakteristik, budaya, keadaan sosial dan sebagainya. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan nasional bisa terlihat dari pembangunan daerah-daerah yang ada.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi dan memperhatikan kemampuan dari sumberdaya daerah yang dimiliki (Soebagyo & Wahyudi, 2008).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Purwanti, 2008). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous

development) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan rasa harga diri, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih.

Sudah tujuh belas tahun Indonesia menghadapi perubahan kondisi pembangunan secara keseluruhan. Pemerintahan dan pembangunan diseluruh Indonesia sudah memasuki otonomi daerah yang memiliki hakikat bahwa pengelolaan pembangunan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah serta terjadinya globalisasi kegiatan ekonomi tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup drastis dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah yang selama ini cenderung seragam mulai berubah dan bervariasi. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa, merupakan provinsi terkecil kedua di pulau Jawa setelah DKI Jakarta bila ditinjau dari segi luas wilayah. DIY mempunyai luas wilayah sebesar 3,133.15 km<sup>2</sup> sedangkan provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 664,01 km<sup>2</sup>, provinsi yang paling besar luas wilayahnya di pulau

jawa yaitu Jawa Timur dengan luas wilayah 47.799,75 km<sup>2</sup>, kemudian provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sebesar 35.377,76 km<sup>2</sup> dan provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah 32800,69 km<sup>2</sup> serta provinsi Banten yang memiliki luas wilayah sebesar 9.662,92 km<sup>2</sup>. Namun demikian dengan luas wilayah yang relatif kecil DIY memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak yaitu sebesar 3.675.768 jiwa berbeda jauh dengan propinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah yang kecil dengan jumlah penduduk sebanyak 10.154.134 jiwa, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015**

No	Wilayah	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
1	DKI Jakarta	664.01	10.154.134
2	Jawa Barat	35,377.76	46.668.214
3	Banten	9,662.92	11.934.373
4	Jawa Tengah	32,800.69	33.753.023
5	DIY	3,133.15	3.675.768
6	Jawa Timur	47,799.75	38.828.061

Sumber: *BPS-Statistik Indonesia 2016*

Provinsi DIY mempunyai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang paling rendah yakni hanya sebesar Rp. 68.050 milyar pada tahun 2011 dan tahun 2015 sebesar Rp.83.462 milyar atau berada di urutan paling bawah setelah Provinsi Banten dengan PDRB-nya sebesar Rp. 290.546 milyar tahun 2011 dan Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 367.959 milyar pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 4,94%, jauh dari laju pertumbuhan provinsi lainnya di pulau jawa seperti Jawa Barat dengan 5,03% dan DKI Jakarta dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,88%. Hal inilah yang harus dilakukan Pemda DIY untuk meningkatkan

pertumbuhan agar tidak tertinggal jauh dari provinsi lainnya seperti ditunjukkan dalam Tabel. 2.

**Tabel 2. Perbandingan PDRB Tahun 2011 dan 2015, PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010**

No	Wilayah	PDRB Thn 2011 (miliar Rp)	PDRB Thn 2015 (miliar Rp)	PDRB/kap Thn 2015 (ribu Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	DKI Jakarta	1.147.558	1.454.102	194.875	5,88
2	Jawa Barat	965.622	1.207.001	32.652	5,03
3	Banten	290.546	367.959	39.977	5,37
4	Jawa Tengah	656.268	806.609	30.025	5,44
5	DIY	68.05	83.462	27.559	4,94
6	Jawa Timur	1.054.402	1.331.418	43.5	5,44

Sumber: *BPS-Statistik Indonesia 2016*

Di Provinsi DIY terdapat empat kabupaten dan satu kota dimana tentunya setiap kabupaten dan kota masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang khas sesuai keadaan daerahnya masing-masing sehingga akan mempunyai PDRB, tingkat pertumbuhan dan prioritas sektoral yang berbeda-beda pula seperti yang terlihat dalam Tabel.3 berikut ini :

**Tabel 3. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Atas Dasar Harga Konstan**

No	Kabupaten/Kota	PDRB Thn 2012 (Milyar Rp)	Persen tase (%)	PDRB Thn 2015 (Milyar Rp)	Persen tase (%)	Laju pertumbuhan ekonomi (%)
1	Kulonprogo	5.475	7,64	6.828	8,18	4,64
2	Bantul	13.407	18,70	15.611	18,70	5,00
3	Gunungkidul	9.696	13,52	11.152	13,36	4,81
4	Sleman	23.957	33,41	28.16	33,74	5,31
5	Yogyakarta	19.189	26,76	22.412	26,85	5,16
	DIY	71.702	100	83.462	100	4,94

Sumber: *BPS-Statistik Indonesia 2016*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2012-2015 terdapat kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata terendah dalam kurun waktu lima tahun dibandingkan kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bantul sebesar 4,64% dan tiga kabupaten lainnya berhasil melampaui laju pertumbuhan provinsi DIY yaitu kabupaten Bantul sebesar 5,00% ,kota Yogyakarta sebesar 5,16% dan yang paling tinggi adalah kabupaten Sleman mencapai 5,31% lebih tinggi 0,37% dari pertumbuhan provinsi DIY sebesar 4,94% .

Masalah yang menjadi penting dalam proses pembangunan di provinsi DIY yaitu belum adanya prioritas sektor basis dalam pengembangan pembangunan. Sembilan sektor yang dimiliki oleh kabupaten/kota memiliki program dalam kegiatan ekonominya. Namun tidak semua dapat dijalankan serentak. Hal ini terkendala oleh anggaran yang dialokasikan, kemudian RPJMD dan “urgensi” program tersebut. Untuk itu prioritas penentuan sektor basis harus dilaksanakan dengan harapan pemerintah dengan kebijakannya dan keterbatasan anggarannya memprioritaskan sektor- sektor basis.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir di kabupaten/kota yang lain cukup baik, namun masing-masing kabupaten/kota harus lebih meningkatkan PDRB nya. Agar hasil pendapatan daerah berkah untuk rakyat setempat, perlu dihindari kegiatan ekonomi atau sektor-sektor yang haram, bertentangan dengan syariat Islam serta merugikan orang banyak. Pemda harus kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Karena masih banyak potensi yang dimiliki belum

dimanfaatkan secara optimal. Sehingga kabupaten/kota di DIY menemukan dan mengetahui sektor- sektor yang unggul di daerahnya.

Banyaknya provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia yang meyebar dari Sabang sampai Merauke dan beragamnya potensi daerah yang berbeda diperlukan perhatian yang serius dalam upaya pengembangan pembangunan oleh Pemerintah. Tidak setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang sama, untuk itu penelitian dan studi lanjutan secara terus-menerus harus dilakukan agar pembangunan di daerah lebih cepat dan sesuai dengan keadaan daerah tersebut. Pemerintah juga harus menjaga agar potensi-potensi tersebut tidak dikuasai pihak asing dengan sesukanya sehingga akan berdampak merugikan daerah tersebut.

Dari uraian diatas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi daerah kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah DIY sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era otonomi daerah. Peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam Penelitian Ini, ada beberapa pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Sektor basis ekonomi apa saja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing bagi kabupaten/kota di Provinsi DIY;
2. Sektor ekonomi apa saja yang mempunyai potensi daya saing kompetitif dan komparatif bagi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY;
3. Bagaimana penentuan prioritas sektor basis untuk pengembangan pembangunan di DIY di tiap kabupaten/kota.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sektor basis ekonomi apa saja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing bagi kabupaten/kota di Provinsi DIY.
2. Mengetahui Sektor ekonomi apa saja yang mempunyai potensi daya saing kompetitif dan komparatif bagi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY.
3. Menentukan prioritas sektor basis guna pengembangan pembangunan di DIY umumnya serta Kabupaten dan Kota Khususnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :



1. Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah (BAPPEDA) yang terkait dengan pengembangan potensi daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY.
2. Dapat menjadi sumber referensi dan informasi tambahan bagi penelitian yang akan datang, khususnya penelitian yang terkait dengan potensi dimasing – masing Kabupaten/Kota.

#### **E. Metode Analisa Data**

##### **1. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data Sekunder dan Primer. Teknik pengumpulan data sekunder melalui kegiatan penelitian kepustakaan (library research) dari pelbagai instansi sebagai sumber data , seperti BPS Provinsi DIY, dan Bappeda Provinsi DIY dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk data primer melalui observasi dengan kuisioner kepada pihak – pihak terkait yang selanjutnya ditabulasi dan diolah menggunakan Expert Choise.i Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugyono, 2012:225).

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

##### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II Landasan Teori**

Dalam bab ini diuraikan tentang penjabaran teori yang terdapat pada usulan penelitian dan memuat materi–materi yang disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan pembahasan atas topik permasalahan.

## **BAB III Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini memuat jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan metode penelitian. Dalam bab ini juga berisi hasil uji analisis data panel dan uji statistik.

## **BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, berdasarkan nilai hasil analisis data panel

## **BAB V Penutup**

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan serangkaian pembahasan skripsi pada bab IV serta saran yang membangun.

## **Daftar Pustaka**

## **Lampiran**